

Siaran Pers SETARA Institute  
INDEKS KOTA TOLERAN (IKT) TAHUN 2023

Jakarta, 30 Januari 2024

## 1. TENTANG IKT 2023

Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2023 merupakan hasil pengukuran yang dilakukan SETARA Institute untuk mempromosikan praktik-praktik baik toleransi kota-kota di Indonesia. Indeks Kota Toleran 2023 merupakan publikasi ke-7 SETARA Institute sejak dipublikasikan pertama kali pada tahun 2015.

Indeks Kota Toleran adalah studi pengukuran kinerja kota, meliputi pemerintah kota dan elemen masyarakat dalam mengelola keberagaman, toleransi dan inklusi sosial. Pengukuran IKT mengombinasikan paradigma hak konstitusional warga sesuai jaminan konstitusi, hak asasi manusia sesuai standar hukum HAM internasional dan tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Melalui IKT, SETARA Institute berharap dapat mendorong setiap kota untuk membangun perencanaan pembangunan yang inklusif, membangun kebijakan yang promotif, mengalokasi anggaran bagi pemajuan toleransi dan inklusi, mencegah peristiwa intoleransi dan memperkuat kolaborasi dalam mengelola keberagaman, toleransi, wawasan kebangsaan dan inklusi sosial.

## 2. METODOLOGI

Kota toleran adalah kota yang memiliki visi dan rencana pembangunan inklusif, regulasi yang kondusif bagi praktik dan promositoleransi, kepemimpinan yang progresif bagi praktik dan promosi toleransi, tingkat intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan rendah, dan upaya berkelanjutan dalam mengelola keberagaman dan inklusi sosial.

SETARA Institute dalam studi ini menurunkan konsep toleransi ke dalam beberapa variabel sistemik kota yang dapat memengaruhi perilaku sosial antar identitas dan entitas warga, yakni: (1) kebijakan-kebijakan pemerintah kota, (2) tindakan-tindakan aparat pemerintah kota, (3) perilaku antar entitas di kota termasuk warga dengan warga, pemerintah dengan warga, dan (4) relasi-relasi sosial dalam heterogenitas demografis warga kota.

IKT mengadopsi kerangka Brian J. Grim dan Roger Finke (2006), yaitu kerangka pengukuran tingkat kebebasan beragama atau derajat toleransi sebuah negara. Dalam kerangka ini, Grim dan Finke menyusun 3 indikator utama untuk mengukur tingkat kebebasan beragama atau derajat toleransi, yakni: (1) Favoritisme atau pengistimewaan pemerintah terhadap kelompok agama tertentu; (2) Peraturan pemerintah yang membatasi kebebasan beragama, dan

(3) Regulasi sosial yang membatasi kebebasan beragama.

SETARA Institute, dengan mempertimbangkan kekhasan Indonesia, memodifikasi kerangka Grim dan Finke dengan tambahan variabel, yakni demografi sosio-keagamaan. Komposisi penduduk dipandang sebagai salah satu parameter dalam mengukur pengelolaan toleransi dan kerukunan di kota. Heterogenitas atau homogenitas latar keagamaan sebuah kota diasumsikan dapat memengaruhi kualitas (upaya) yang dilakukan oleh pemerintah kota.

Objek kajian IKT adalah 94 kota dari total 98 kota di seluruh Indonesia. 4 kota yang dieliminir merupakan kota-kota administrasi di DKI Jakarta yang digabungkan menjadi 1 (satu) kota DKI Jakarta. Penggabungan ini dilakukan karena secara administratif dan legal, kota-kota tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak valid untuk dinilai secara terpisah.

Mengacu pada definisi operasional dan berdasarkan pada kerangka *indexing*, studi IKT menetapkan 4 (empat) variabel dengan 8 (delapan) indikator sebagai alat ukur.

A. Regulasi Pemerintah Kota

- Indikator 1 : Rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya.
- Indikator 2 : Ada tidaknya kebijakan diskriminatif.

B. Regulasi Sosial

- Indikator 3 : Peristiwa intoleransi.
- Indikator 4 : Dinamika masyarakat sipil terkait isu toleransi.

C. Tindakan Pemerintah

- Indikator 5 : Pernyataan pejabat kunci tentang isu toleransi.
- Indikator 6 : Tindakan nyata terkait isu toleransi.

D. Demografi Sosio-Keagamaan

- Indikator 7 : Heterogenitas keagamaan penduduk.
- Indikator 8 : Inklusi sosial keagamaan.

Sumber data penelitian diperoleh dari dokumen resmi pemerintah kota, data Badan Pusat Statistik (BPS), data Komnas Perempuan, data SETARA Institute, dan referensi media terpilih. Pengumpulan data juga dilakukan melalui kuesioner *self-assessment* kepada seluruh pemerintah kota.

Dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat pengaruh masing-masing indikator pada situasi faktual toleransi di setiap kota, SETARA Institute melakukan pembobotan dengan persentase berbeda pada setiap indikator. Kombinasi pembobotan dalam setiap indikator menghasilkan persentase akhir pengukuran sebagai berikut:

- |    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | RPJMD dan produk hukum lain                | [10 %] |
| 2. | Ada tidaknya kebijakan diskriminatif       | [20 %] |
| 3. | Peristiwa intoleransi                      | [20 %] |
| 4. | Dinamika masyarakat sipil                  | [10 %] |
| 5. | Pernyataan pejabat kunci terkait toleransi | [10 %] |
| 6. | Tindakan nyata terkait toleransi           | [15 %] |
| 7. | Heterogenitas keagamaan penduduk           | [ 5 %] |
| 8. | Inklusi sosial keagamaan                   | [10 %] |

Rerata hasil dari kombinasi pembobotan diukur ke dalam *scoring* dengan skala nilai 1-7, yang menggambarkan rentang gradatif dari kualitas rendah ke tinggi, dengan nilai (1) untuk kualitas rendah dan (7) untuk kualitas tertinggi.

### 3. TEMUAN PENELITIAN IKT 2023

#### 3.1. KOTA DENGAN SKOR TOLERANSI TERTINGGI

Inovasi dan terobosan yang dilakukan kota-kota, yang pada pokoknya menuju pelembagaan toleransi dan tata kelola pemerintahan inklusif merupakan capaian progresif-kolektif yang menjadi temuan penelitian ini. Tahun 2023 menjadi tahun dimana kota-kota memastikan pelembagaan pemajuan toleransi ke dalam bentuk produk hukum daerah. Visi toleransi yang sebelumnya berada pada level narasi dan program insidental, di tahun 2023 telah bertransformasi menjadi kebijakan dan program sistemik yang dituangkan dalam peraturan daerah, peraturan walikota dan program-program strategis berkelanjutan.

Capaian pada 10 kota teratas adalah dampak keterpenuhan tiga aspek kepemimpinan yang dibutuhkan dalam memperkuat ekosistem toleransi di sebuah kota: kepemimpinan kemasyarakatan (*societal leadership*), kepemimpinan politik (*political leadership*) dan kepemimpinan birokrasi (*bureaucratic leadership*).

Tabel 1

10 Kota dengan Skor Toleransi Tertinggi pada IKT 2023

Rangking	Kota	Ind 1	Ind 2	Ind 3	Ind 4	Ind 5	Ind 6	Ind 7	Ind 8	Skor Akhir
1	Singkawang	6,50	7,00	6,50	6,00	6,00	7,00	6,00	6,00	6,500
2	Bekasi	6,00	6,55	7,00	6,00	6,00	7,00	6,00	6,00	6,460
3	Salatiga	6,50	7,00	6,50	6,00	6,00	7,00	5,00	6,00	6,450
4	Manado	6,00	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,400
5	Semarang	6,00	6,90	6,50	6,00	6,00	6,00	5,00	6,00	6,230
6	Magelang	6,00	6,85	7,00	5,00	6,00	6,00	5,00	6,00	6,220
7	Kediri	5,83	6,70	7,00	5,00	6,00	6,00	5,00	5,00	6,073
8	Sukabumi	5,17	6,65	6,50	5,00	6,00	6,00	5,00	6,00	5,997

Rangking	Kota	Ind 1	Ind 2	Ind 3	Ind 4	Ind 5	Ind 6	Ind 7	Ind 8	Skor Akhir
9	Kupang	5,33	6,85	7,00	6,00	5,00	5,00	6,00	5,00	5,953
10	Surakarta	5,50	7,00	6,00	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	5,800

Pada Studi Indeks Kota Toleran 2023, penelitian ini mencatat terobosan progresif pada kepemimpinan toleransi di Kota Bogor yang secara terus menerus menuju puncak, meskipun masih terhenti di peringkat 12 secara kumulatif. Tetapi Kota Bogor mencatat nilai tertinggi dan terbaik pada aspek kepemimpinan toleransi.

Pada Studi Indeks Kota Toleran 2023, penelitian ini mencatat terobosan kebijakan toleransi terbaik dalam bentuk peraturan daerah, yaitu Kota Banjarmasin. Terbitnya Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Lahirnya sebuah perda, berbeda dengan perkada, menunjukkan kolaborasi tiga aspek kepemimpinan toleransi pada level politik, birokrasi dan masyarakat telah bekerja. Banjarmasin adalah kota dengan peningkatan paling dramatis dari peringkat 59 pada IKT 2022 menjadi peringkat 13 pada IKT 2023.

### 3.2. KOTA DENGAN SKOR TOLERANSI TERENDAH

Tabel 2

10 Kota dengan Skor Toleransi Terendah pada IKT 2023

Rangking	Kota	Ind 1	Ind 2	Ind 3	Ind 4	Ind 5	Ind 6	Ind 7	Ind 8	Skor Akhir
85	Sabang	3,67	6,70	7,00	2,00	3,00	3,00	2,00	3,00	4,457
86	Bandar Lampung	3,00	6,25	5,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,450
87	Palembang	3,33	6,75	5,50	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,433
88	Pekanbaru	3,50	6,35	5,00	3,00	4,00	4,00	4,00	3,00	4,420
89	Mataram	3,67	5,85	5,50	3,00	4,00	4,00	3,00	3,00	4,387
90	Lhokseumawe	3,67	5,55	7,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,377
91	Padang	3,67	4,90	5,00	5,00	4,00	3,00	4,00	4,00	4,297
92	Banda Aceh	3,50	5,80	7,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00	4,260
93	Cilegon	3,33	5,30	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,193
94	Depok	4,00	4,55	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,010

Terdapat temuan positif bahwa kota-kota pada peringkat 10 terbawah ini telah melakukan berbagai upaya untuk membenahi diri, mulai membangun ekosistem toleransi terutama melalui perluasan partisipasi dan peran yang diambil elemen masyarakat. Hal tersebut terpotret melalui temuan rata-rata skor pada 10 kota terbawah yang mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Pada IKT 2022, zona 10 kota terendah berada pada rata-rata skor 4,17. Skor tersebut naik

pada IKT 2023 menjadi 4,33. Dengan kata lain, meskipun masih berada di papan bawah, kota-kota tersebut mulai berbenah.

Namun demikian, perlu juga dipahami bahwa 10 kota dengan skor terendah, hingga saat ini masih menghadapi tantangan pada aspek kepemimpinan politik dan kepemimpinan birokrasi yang kurang kondusif dalam pemajuan toleransi, sekalipun kepemimpinan sosial toleransi mulai tumbuh. Artikulasi dua tantangan kepemimpinan ini mewujudkan pada masih menguatnya favoritisme atas kelompok sosial keagamaan tertentu dan formalisme keberagaman yang digagas dan diinstitusionalisasi ke dalam tubuh kota melalui peraturan-peraturan yang berbasis agama. Aneka produk hukum berbasis agama tentu telah dan terus berpotensi menimbulkan tindakan diskriminatif. Inilah yang oleh Komnas Perempuan (2009) disebut sebagai pelembagaan diskriminasi. Produk-produk hukum ini masih eksis di Aceh, Padang, Depok dan Cilegon.

### 3.3. SKOR TERTINGGI BERDASARKAN VARIABEL 1: REGULASI PEMERINTAH

Tabel 3

10 Kota dengan Skor Tertinggi Variabel Regulasi Pemerintah

Rangking IKT 2023	Kota	Ind 1	Ind 2	Jumlah	Rangking Variabel
1	Singkawang	6,50	7,00	6,75	1
3	Salatiga	6,50	6,55	6,53	2
4	Manado	6,00	7,00	6,50	3
5	Semarang	6,00	6,90	6,45	4
6	Magelang	6,00	6,85	6,43	5
2	Bekasi	6,00	6,55	6,27	6
7	Kediri	5,83	6,70	6,27	7
10	Surakarta	5,50	7,00	6,25	8
9	Kupang	5,33	6,85	6,09	9
68	DKI Jakarta	5,50	6,40	5,95	10

### 3.4. SKOR TERTINGGI BERDASARKAN VARIABEL 2: REGULASI SOSIAL

Tabel 4

10 Kota dengan Skor Tertinggi Variabel Regulasi Sosial

Rangking IKT 2023	Kota	Ind 3	Ind 4	Jumlah	Rangking Variabel
2	Bekasi	7,00	6,00	6,50	1
4	Manado	7,00	6,00	6,50	2
9	Kupang	7,00	6,00	6,50	3
5	Semarang	6,50	6,00	6,25	4
13	Banjarmasin	6,50	6,00	6,25	5
3	Salatiga	6,50	6,00	6,25	6
7	Kediri	7,00	5,00	6,00	7
14	Ambon	7,00	5,00	6,00	8
18	Pontianak	7,00	5,00	6,00	9
12	Bogor	6,50	5,00	5,75	10

### 3.5. SKOR TERTINGGI BERDASARKAN VARIABEL 3: TINDAKAN PEMERINTAH

Tabel 5

10 Kota dengan Skor Tertinggi Variabel Tindakan Pemerintah

Rangking IKT 2023	Kota	Ind 5	Ind 6	Jumlah	Rangking Variabel
12	Bogor	6,00	7,00	6,50	1
1	Singkawang	6,00	7,00	6,50	2
2	Bekasi	6,00	7,00	6,50	3
3	Salatiga	6,00	7,00	6,50	4
5	Semarang	6,00	6,00	6,00	5
4	Manado	6,00	6,00	6,00	6
13	Banjarmasin	6,00	6,00	6,00	7
6	Magelang	6,00	6,00	6,00	8
8	Sukabumi	5,00	6,00	5,50	9
11	Pematang Siantar	5,00	6,00	5,50	10

### 3.6. KOTA DENGAN PENINGKATAN RANGKING TERTINGGI PADA IKT 2023

Tabel 6

### 10 Kota dengan Peningkatan Rangkaing Tertinggi

No	Kota	Rangking IKT 2022	Rangking IKT 2023	Jumlah Peningkatan
1	Banjarmasin	72	13	59
2	Surabaya	68	16	52
3	Malang	52	20	32
4	Bukittinggi	78	52	26
5	Makassar	84	62	22
6	Pematang Siantar	31	11	20
7	Prabumulih	85	71	14
8	Bandung	26	16	10
9	Pariaman	87	79	8
10	Bogor	17	12	5

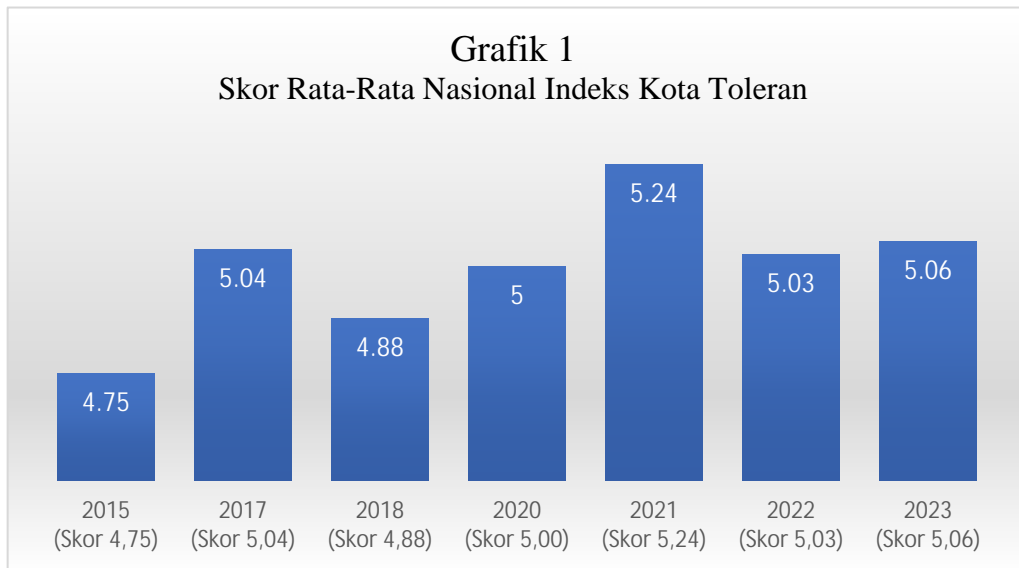
### 3.7. KOTA DENGAN PERINGKAT TERTINGGI KATEGORI PENDUDUK DI ATAS 1 JUTA Jiwa

Tabel 7

#### 10 Kota Peringkat Tertinggi Kategori Berpenduduk Di atas 1 Juta Jiwa

Ranking	Kota	Jumlah Penduduk	Rangking IKT 2023
1	Bekasi	2.590.260	2
2	Semarang	1.659.975	5
3	Bogor	1.063.513	12
4	Bandung	2.693.500	15
5	Surabaya	2.887.223	16
6	Batam	1.240.792	28
7	Tangerang	1.930.556	37
8	Makassar	1.432.189	62
9	DKI Jakarta	10.679.951	68
10	Medan	2.494.512	73

## 4. TREN DAN DINAMIKA TOLERANSI KOTA 2023



Sumber: diolah tim peneliti dari IKT 2015-2023

Skor rata-rata nasional sejak publikasi IKT pertama tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Di tahun 2015 skor rata-rata berada di angka 4,75 dan angka tertinggi di tahun 2021 dengan skor 5,24. Sementara rata-rata nasional pada tahun 2023 adalah 5,06. Dengan demikian, meskipun sempat terjadi penurunan rata-rata nasional antara tahun 2021 ke 2022, tetapi progresivitas yang terjadi selama tahun 2023 memicu kenaikan rata-rata nasional dari tahun sebelumnya. Angka 5,06 untuk rata-rata nasional dari skala 1-7 menunjukkan bahwa toleransi di Indonesia cukup baik dan menunjukkan status *improving* berkelanjutan. Penelitian IKT 2023 menemukan 63 produk hukum baru yang progresif menopang ekosistem toleransi di kota-kota, dengan rincian 11 peraturan daerah, 16 peraturan walikota, 34 peraturan dan keputusan turunan teknis, dan 2 rancangan perda yang segera dibahas dan disahkan.

## 5. REKOMENDASI

1. Pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu melakukan peninjauan ulang terhadap produk hukum daerah yang diskriminatif, baik produk hukum daerah terdahulu maupun produk hukum daerah yang terbit dalam beberapa tahun terakhir. Aneka produk hukum tersebut tersebut nyata-nyata menjadi landasan pacu tumbuh suburnya praktik intoleransi, baik dilakukan aktor negara maupun non-negara.
2. Pemerintah pusat perlu mendesain dan menerbitkan peraturan di tingkat nasional, seperti Peraturan Presiden, yang menjadi



rujukan kota-kota dalam membuat peraturan untuk memastikan kokohnya kerangka hukum pemajuan toleransi di kotakabupaten. Tata kelola pemerintahan inklusif (*inclusive governance*) didorong sebagai prinsip utama dalam menjawab tantangan virus intoleransi yang berada pada lapis negara maupun non-negara.

3. Pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mendorong maupun memfasilitasi kolaborasi antar-kota/kabupaten dalam pemajuan toleransi melalui perencanaan pembangunan yang toleran-inklusif pada 2024-2025, dimana proses penyusunan RPJMN dan RPJMD akan berlangsung secara serentak. Kebutuhan ini sejalan dengan Visi Indonesia 2045 yang menaruh perhatian pada aspek toleransi, kohesi sosial, inklusivitas, hingga kemajemukan.
4. Mendorong pemerintah provinsi untuk terlibat aktif dalam mengorkestrasi pembangunan ekosistem toleransi di wilayahnya, baik level kota maupun kabupaten. Produk hukum yang promotif terhadap toleransi pada tingkat provinsi perlu didorong agar diadopsi menjadi produk hukum level kabupaten/kota.
5. Pemerintah pusat, provinsi dan kota/kabupaten memberikan dukungan anggaran memadai bagi FKUB dan bagi inisiatif-inisiatif pemajuan toleransi-inklusi di kota/kabupaten.
6. Mendorong kota-kota (dan kabupaten), baik antar pemerintah kota maupun elemen masyarakat sipil, untuk saling membangun kolaborasi dan gotong royong dalam rangka pemajuan toleransi. Kondisi ini terbukti berhasil dalam tular-menular pemajuan toleransi antar-kota.

Narahubung:

- Halili Hasan, Direktur Eksekutif SETARA Institute: 0852 3000 8880
- Ikhsan Yosarie, Peneliti SETARA Institute: 0822 8638 9295
- Sayyidatul Insiyah, Peneliti SETARA Institute: 08953 6691 5954

SKOR 94 KOTA PADA INDEKS KOTA TOLERAN 2023  
SETARA Institute, Jakarta

No	KOTA	Regulasi Pemerintah				Regulasi Sosial				Tindakan Pemerintah				Demografi Agama				SKOR AKHIR
		IND 1	10%	IND 2	20%	IND 3	20%	IND 4	10%	IND 5	10%	IND 6	15%	IND 7	5%	IND 8	10%	
		30%				30%				25%				15%				
1	Singkawang	6,50	0,650	7,00	1,400	6,50	1,300	6,00	0,600	6,00	0,600	7,00	1,050	6,00	0,300	6,00	0,600	6,500
2	Bekasi	6,00	0,600	6,55	1,310	7,00	1,400	6,00	0,600	6,00	0,600	7,00	1,050	6,00	0,300	6,00	0,600	6,460
3	Salatiga	6,50	0,650	7,00	1,400	6,50	1,300	6,00	0,600	6,00	0,600	7,00	1,050	5,00	0,250	6,00	0,600	6,450
4	Manado	6,00	0,600	7,00	1,400	7,00	1,400	6,00	0,600	6,00	0,600	6,00	0,900	6,00	0,300	6,00	0,600	6,400
5	Semarang	6,00	0,600	6,90	1,380	6,50	1,300	6,00	0,600	6,00	0,600	6,00	0,900	5,00	0,250	6,00	0,600	6,230
6	Magelang	6,00	0,600	6,85	1,370	7,00	1,400	5,00	0,500	6,00	0,600	6,00	0,900	5,00	0,250	6,00	0,600	6,220
7	Kediri	5,83	0,583	6,70	1,340	7,00	1,400	5,00	0,500	6,00	0,600	6,00	0,900	5,00	0,250	5,00	0,500	6,073
8	Sukabumi	5,17	0,517	6,65	1,330	6,50	1,300	5,00	0,500	6,00	0,600	6,00	0,900	5,00	0,250	6,00	0,600	5,997
9	Kupang	5,33	0,533	6,85	1,370	7,00	1,400	6,00	0,600	5,00	0,500	5,00	0,750	6,00	0,300	5,00	0,500	5,953
10	Surakarta	5,50	0,550	7,00	1,400	6,00	1,200	5,00	0,500	5,00	0,500	5,00	0,750	6,00	0,300	6,00	0,600	5,800
11	Pematang Siantar	4,50	0,450	7,00	1,400	6,50	1,300	4,00	0,400	5,00	0,500	6,00	0,900	6,00	0,300	5,00	0,500	5,750
12	Bogor	4,50	0,450	5,40	1,080	6,50	1,300	6,00	0,600	6,00	0,600	7,00	1,050	5,00	0,250	4,00	0,400	5,730
13	Banjarmasin	4,83	0,483	5,65	1,130	6,50	1,300	6,00	0,600	6,00	0,600	6,00	0,900	4,00	0,200	4,00	0,400	5,613
14	Ambon	4,50	0,450	7,00	1,400	7,00	1,400	5,00	0,500	5,00	0,500	4,00	0,600	5,00	0,250	5,00	0,500	5,600
15	Bandung	5,17	0,517	6,65	1,330	6,00	1,200	5,00	0,500	5,00	0,500	5,00	0,750	5,00	0,250	5,00	0,500	5,547
16	Surabaya	4,83	0,483	5,55	1,110	5,50	1,100	6,00	0,600	5,00	0,500	6,00	0,900	5,00	0,250	6,00	0,600	5,543
17	Tomohon	5,00	0,500	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	5,00	0,750	4,00	0,200	5,00	0,500	5,450
18	Pontianak	4,00	0,400	7,00	1,400	7,00	1,400	5,00	0,500	5,00	0,500	4,00	0,600	5,00	0,250	4,00	0,400	5,450

19	Yogyakarta	3,83	0,383	7,00	1,400	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	0,400	6,00	0,900	3,00	0,150	4,00	0,400	5,433
20	Malang	4,50	0,450	5,60	1,120	6,00	1,200	5,00	0,500	6,00	0,600	5,00	0,750	5,00	0,250	5,00	0,500	5,370
21	Madiun	3,83	0,383	6,85	1,370	7,00	1,400	4,00	0,400	5,00	0,500	4,00	0,600	4,00	0,200	5,00	0,500	5,353
22	Batu	5,00	0,500	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	5,00	0,500	5,300
23	Jayapura	4,83	0,483	7,00	1,400	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	4,00	0,400	5,283
24	Probolinggo	4,67	0,467	7,00	1,400	7,00	1,400	4,00	0,400	5,00	0,500	4,00	0,600	2,00	0,100	4,00	0,400	5,267
25	Cimahi	4,67	0,467	6,70	1,340	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	5,00	0,750	4,00	0,200	4,00	0,400	5,257
26	Denpasar	4,33	0,433	7,00	1,400	6,00	1,200	3,00	0,300	4,00	0,400	5,00	0,750	5,00	0,250	5,00	0,500	5,233
27	Palu	4,17	0,417	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	5,00	0,750	3,00	0,150	4,00	0,400	5,217
28	Batam	4,00	0,400	6,70	1,340	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	5,00	0,250	5,00	0,500	5,190
29	Tegal	5,17	0,517	6,85	1,370	6,50	1,300	4,00	0,400	5,00	0,500	4,00	0,600	2,00	0,100	4,00	0,400	5,187
30	Sorong	4,33	0,433	7,00	1,400	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	0,400	3,00	0,450	4,00	0,200	5,00	0,500	5,183
31	Sibolga	4,33	0,433	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	5,00	0,750	4,00	0,200	3,00	0,300	5,183
32	Tanjung Pinang	5,83	0,583	6,50	1,300	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	3,00	0,300	5,183
33	Palangkaraya	4,50	0,450	6,85	1,370	6,50	1,300	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	5,00	0,250	4,00	0,400	5,170
34	Samarinda	3,50	0,350	6,35	1,270	6,50	1,300	4,00	0,400	5,00	0,500	5,00	0,750	4,00	0,200	4,00	0,400	5,170
35	Kendari	2,67	0,267	7,00	1,400	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	5,00	0,500	5,167
36	Bitung	4,50	0,450	7,00	1,400	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	0,400	3,00	0,450	5,00	0,250	4,00	0,400	5,150
37	Tangerang	3,50	0,350	6,45	1,290	6,50	1,300	4,00	0,400	5,00	0,500	5,00	0,750	3,00	0,150	4,00	0,400	5,140
38	Pangkal Pinang	4,33	0,433	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	4,00	0,400	5,133
39	Mojokerto	4,33	0,433	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300	3,00	0,300	5,00	0,750	3,00	0,150	4,00	0,400	5,133
40	Tarakan	4,17	0,417	6,20	1,240	6,50	1,300	5,00	0,500	5,00	0,500	5,00	0,750	4,00	0,200	2,00	0,200	5,107
41	Tual	4,00	0,400	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	4,00	0,400	5,100
42	Pare Pare	4,00	0,400	7,00	1,400	6,50	1,300	4,00	0,400	4,00	0,400	5,00	0,750	3,00	0,150	3,00	0,300	5,100
43	Binjai	3,83	0,383	7,00	1,400	6,50	1,300	4,00	0,400	3,00	0,300	5,00	0,750	3,00	0,150	4,00	0,400	5,083

44	Kotamobagu	4,00	0,400	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	3,00	0,150	4,00	0,400	5,050
45	Gunung sitoli	3,83	0,383	6,50	1,300	6,50	1,300	4,00	0,400	5,00	0,500	5,00	0,750	4,00	0,200	2,00	0,200	5,033
46	Cirebon	5,33	0,533	6,70	1,340	6,00	1,200	4,00	0,400	3,00	0,300	3,00	0,450	4,00	0,200	6,00	0,600	5,023
47	Tangerang Selatan	4,00	0,400	6,60	1,320	6,50	1,300	4,00	0,400	4,00	0,400	5,00	0,750	3,00	0,150	3,00	0,300	5,020
48	Solok	4,50	0,450	6,55	1,310	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	3,00	0,150	3,00	0,300	5,010
49	Bengkulu	4,33	0,433	6,85	1,370	7,00	1,400	3,00	0,300	3,00	0,300	5,00	0,750	3,00	0,150	3,00	0,300	5,003
50	Sawahlunto	3,50	0,350	6,40	1,280	7,00	1,400	4,00	0,400	5,00	0,500	4,00	0,600	3,00	0,150	3,00	0,300	4,980
51	Langsa	2,83	0,283	6,40	1,280	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	4,00	0,400	4,963
52	Bukittinggi	4,00	0,400	5,95	1,190	7,00	1,400	5,00	0,500	4,00	0,400	4,00	0,600	3,00	0,150	3,00	0,300	4,940
53	Bontang	4,33	0,433	7,00	1,400	6,50	1,300	3,00	0,300	3,00	0,300	4,00	0,600	4,00	0,200	4,00	0,400	4,933
54	Gorontalo	4,00	0,400	6,90	1,380	6,50	1,300	2,00	0,200	3,00	0,300	5,00	0,750	4,00	0,200	4,00	0,400	4,930
55	Serang	4,00	0,400	6,15	1,230	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	2,00	0,100	4,00	0,400	4,930
56	Tanjung Balai	3,83	0,383	6,85	1,370	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	3,00	0,150	2,00	0,200	4,903
57	Banjar	3,83	0,383	6,80	1,360	7,00	1,400	4,00	0,400	5,00	0,500	2,00	0,300	3,00	0,150	4,00	0,400	4,893
58	Ternate	5,17	0,517	6,35	1,270	6,50	1,300	3,00	0,300	5,00	0,500	4,00	0,600	2,00	0,100	3,00	0,300	4,887
59	Tebing Tinggi	5,00	0,500	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300	3,00	0,300	4,00	0,600	3,00	0,150	2,00	0,200	4,850
60	Jambi	4,50	0,450	6,90	1,380	6,00	1,200	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	2,00	0,200	4,830
61	Tasikmalaya	5,00	0,500	6,60	1,320	6,50	1,300	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	2,00	0,100	3,00	0,300	4,820
62	Makassar	5,17	0,517	4,60	0,920	4,50	0,900	5,00	0,500	5,00	0,500	5,00	0,750	4,00	0,200	5,00	0,500	4,787
63	Pasuruan	3,33	0,333	6,70	1,340	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	2,00	0,100	3,00	0,300	4,773
64	Palopo	3,33	0,333	7,00	1,400	6,50	1,300	3,00	0,300	3,00	0,300	3,00	0,450	3,00	0,150	5,00	0,500	4,733
65	Metro	3,00	0,300	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300	3,00	0,300	3,00	0,450	3,00	0,150	4,00	0,400	4,700
66	Blitar	4,17	0,417	6,90	1,380	6,00	1,200	2,00	0,200	3,00	0,300	4,00	0,600	4,00	0,200	4,00	0,400	4,697
67	Lubuk Linggau	4,17	0,417	6,60	1,320	7,00	1,400	2,00	0,200	3,00	0,300	3,00	0,450	2,00	0,100	5,00	0,500	4,687
68	DKI Jakarta	5,50	0,550	6,40	1,280	3,50	0,700	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	5,00	0,250	5,00	0,500	4,680
69	Padang Panjang	3,17	0,317	6,70	1,340	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	3,00	0,450	3,00	0,150	3,00	0,300	4,657

70	Dumai	4,00	0,400	7,00	1,400	6,50	1,300	3,00	0,300	2,00	0,200	3,00	0,450	4,00	0,200	4,00	0,400	4,650
71	Prabumulih	2,00	0,200	6,55	1,310	7,00	1,400	3,00	0,300	5,00	0,500	3,00	0,450	3,00	0,150	3,00	0,300	4,610
72	Payakumbuh	3,67	0,367	6,45	1,290	6,00	1,200	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	3,00	0,150	3,00	0,300	4,607
73	Medan	4,17	0,417	6,10	1,220	3,50	0,700	5,00	0,500	4,00	0,400	5,00	0,750	4,00	0,200	4,00	0,400	4,587
74	Bima	3,83	0,383	7,00	1,400	7,00	1,400	2,00	0,200	2,00	0,200	3,00	0,450	3,00	0,150	4,00	0,400	4,583
75	Bau Bau	3,00	0,300	6,90	1,380	7,00	1,400	1,00	0,100	3,00	0,300	4,00	0,600	4,00	0,200	3,00	0,300	4,580
76	Banjarbaru	4,33	0,433	6,45	1,290	6,50	1,300	3,00	0,300	5,00	0,500	2,00	0,300	3,00	0,150	3,00	0,300	4,573
77	Tidore Kepulauan	4,00	0,400	6,85	1,370	6,50	1,300	3,00	0,300	3,00	0,300	3,00	0,450	3,00	0,150	3,00	0,300	4,570
78	Sungai Penuh	4,00	0,400	6,75	1,350	7,00	1,400	3,00	0,300	3,00	0,300	3,00	0,450	3,00	0,150	2,00	0,200	4,550
79	Pariaman	2,00	0,200	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	3,00	0,450	2,00	0,100	3,00	0,300	4,550
80	Balikpapan	3,67	0,367	6,60	1,320	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	0,400	2,00	0,300	3,00	0,150	2,00	0,200	4,537
81	Pagar Alam	3,33	0,333	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300	2,00	0,200	3,00	0,450	3,00	0,150	3,00	0,300	4,533
82	Padangsidempuan	3,00	0,300	7,00	1,400	7,00	1,400	2,00	0,200	3,00	0,300	3,00	0,450	3,00	0,150	3,00	0,300	4,500
83	Subulussalam	3,00	0,300	6,70	1,340	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	3,00	0,450	2,00	0,100	2,00	0,200	4,490
84	Pekalongan	3,17	0,317	7,00	1,400	4,00	0,800	3,00	0,300	5,00	0,500	4,00	0,600	3,00	0,150	4,00	0,400	4,467
85	Sabang	3,67	0,367	6,70	1,340	7,00	1,400	2,00	0,200	3,00	0,300	3,00	0,450	2,00	0,100	3,00	0,300	4,457
86	Bandar Lampung	3,00	0,300	6,25	1,250	5,00	1,000	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	4,00	0,400	4,450
87	Palembang	3,33	0,333	6,75	1,350	5,50	1,100	3,00	0,300	3,00	0,300	3,00	0,450	4,00	0,200	4,00	0,400	4,433
88	Pekanbaru	3,50	0,350	6,35	1,270	5,00	1,000	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	3,00	0,300	4,420
89	Mataram	3,67	0,367	5,85	1,170	5,50	1,100	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	3,00	0,150	3,00	0,300	4,387
90	Lhokseumawe	3,67	0,367	5,55	1,110	7,00	1,400	3,00	0,300	3,00	0,300	3,00	0,450	3,00	0,150	3,00	0,300	4,377
91	Padang	3,67	0,367	4,90	0,980	5,00	1,000	5,00	0,500	4,00	0,400	3,00	0,450	4,00	0,200	4,00	0,400	4,297
92	Banda Aceh	3,50	0,350	5,80	1,160	7,00	1,400	3,00	0,300	2,00	0,200	3,00	0,450	2,00	0,100	3,00	0,300	4,260
93	Cilegon	3,33	0,333	5,30	1,060	4,00	0,800	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	4,00	0,400	4,193
94	Depok	4,00	0,400	4,55	0,910	3,50	0,700	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	4,00	0,400	4,010